

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT ANTARA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA DENGAN PT.  
MITRATANI TATAS LESTARI**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**DAFTAR ISI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM  
PERJANJIAN KERJASAMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA  
DENGAN PT. MITRATANI TATAS LESTARI**

**ABSTRAK**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dalam negara hukum, kekuasaan dalam menjalankan Pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, di Indonesia sudah banyak dilakukan perjanjian kerjasama dibidang perkebunan, dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan berasaskan pada asas kepastian hukum untuk melindungi para pihak dalam perjanjian kerjasama antara BUMD dengan PT.MTL dimana dalam perjanjian pengelolaan perkebunan tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak PT.MTL. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permasalahan yang diteliti adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit, bagaimana akibat hukum terhadap hak masyarakat dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat didalam perjanjian perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengolahan data dilakukan secara editing dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) terjadinya Hubungan perdata antara para pihak berdasarkan akta perjanjian kerjasama antara BUMD dengan PT.MTL dan surat penyerahan lahan antara masyarakat dengan BUMD (2) akibat hukum terhadap lahan masyarakat dalam perjanjian kerjasama ini terjadinya peralihan hak, dari hak milik masyarakat menjadi tanah Negara. (3) tidak adanya perlindungan hukum terhadap lahan masyarakat yang telah diserahkan kepada pihak BUMD untuk diberikan Hak Guna Usaha

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Masyarakat, Perjanjian Kerjasama.

**LEGAL PROTECTION OF COMMUNITY RIGHTS IN THE  
COOPERATION AGREEMENT OF PALM OIL PLANTATION  
BETWEEN THE REGIONAL BUSINESS COMPANY PT. BUNGO DANI  
MANDIRI UTAMA WITH PT. MITRATANI TATAS LESTARI**

**Abstract**

The State of the Republic of Indonesia is a legal state which is contained in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, in the rule of law, the power in running the Government based on the rule of law, in Indonesia there have been many cooperation agreements in the field of plantation, in the establishment of plantation based on the principle legal certainty to protect the parties in the cooperation agreement between BUMD and PT.MTL where in the plantation management agreement is not running smoothly, causing conflict between the community with PT.MTL party. Based on the above issues, what is the legal relationship between the parties in the oil palm plantation cooperation agreement, how is the legal effect on the community rights in the oil palm plantation cooperation agreement, how is the legal protection of the community within the palm oil plantation agreement. This research is juridical sociological with the nature of research is descriptive analytical. Processing is done by editing and then analyzed by using qualitative analysis metode. From the result of the research, it can be concluded that (1) the occurrence of civil relation between the parties based on the cooperation agreement between BUMD and PT.MTL and letter of land delivery between the community and BUMD (2) due to law on community land in this cooperation agreement the transition of rights, from public property rights to State land. (3) the absence of legal protection of community land that has been submitted to the BUMD to be granted the Right to Use Enterprises

Keywords: Legal Protection, Community Rights, Cooperation Agreement.